



Green Economy dan Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20

Lisbet*)

Abstrak

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio+20 telah menghasilkan dokumen berjudul "The Future We Want," yang berisi visi bersama para kepala negara maupun pemerintahan untuk memperbaharui komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perekonomian, sosial dan lingkungan hidup. Mereka menyadari bahwa untuk mengaplikasikan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar tercipta pembangunan berkelanjutan di segala aspek. Sebagai langkah lanjut, Indonesia menghimbau segera diwujudkannya *green economy* di setiap negara.

Pendahuluan

Ekonomi hijau (*green economy*) dan kelembagaan pembangunan berkelanjutan menjadi dua agenda pembahasan Konferensi Tingkat Tinggi Berkelanjutan atau "Rio+20" yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil, tanggal 20--22 Juni 2012. KTT yang digelar oleh *United Nations Conference on Sustainable Development* (UNCSD) ini mengambil nama tersebut, karena persis bertepatan dengan 20 tahun terselenggaranya *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau yang lebih dikenal dengan sebutan KTT Bumi (*Earth Summit*).

Dalam *Earth Summit* di tahun 1992 lahir Deklarasi Rio yang berisi tiga komitmen utama yakni, pertama, negara maju diwajibkan untuk memperhatikan lingkungan dalam pembangunannya.

Kedua, negara berkembang diizinkan melanjutkan pembangunannya seperti biasa, dengan mulai menerapkan model pembangunan hijau. Ketiga, negara maju juga diwajibkan membantu negara berkembang untuk menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan baik melalui dukungan pendanaan maupun alih teknologi.

Sayangnya, meskipun KTT ini telah berusia 20 tahun komitmen tersebut tetap dalam tahap retorika. Hingga saat ini masih sangat sulit menahan laju produksi kerusakan alam yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi, jika kita menyadari fakta bahwa yang menjadi sponsor utama dari KTT-KTT semacam ini justru merupakan negara-negara maju yang mendirikan industri sumber daya alam perusak lingkungan di negara-negara sedang berkembang.

*) Peneliti Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lisbet.sihombing@dpr.go.id

The Future We Want

Pertemuan PBB untuk pembangunan berkelanjutan di Brasil berakhir dengan keputusan para pemimpin dunia mengadopsi sebuah deklarasi politik. Dokumen Rio+20 pun dipersiapkan oleh tuan rumah Brasil dengan tujuan mengingatkan negara-negara di dunia untuk kembali memberi perhatian pada pembangunan berkelanjutan. Pada dokumen ini, dicantumkan adanya visi bersama dan janji dari para kepala negara maupun pemerintahan yang hadir pada KTT Rio+20 untuk memperbaharui komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perekonomian, sosial dan lingkungan bagi dunia dan generasi mendatang.

Para kepala negara dan pemerintahan menyadari bahwa untuk mengaplikasikan pembangunan yang berkelanjutan di segala aspek kehidupan diperlukan dukungan dari semua pihak. Tantangan terbesar adalah untuk pengentasan kemiskinan dan kelaparan, untuk itu akan dilakukan upaya terobosan untuk mengurangi kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang. Negara berkembang perlu diberi kesempatan untuk membangun berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan diversifikasi, pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.

Banyak pengamat lingkungan dan pembangunan mengatakan, kesepakatan Rio+20 sangat kecil untuk mengatasi krisis sosial dan lingkungan. Sejauh ini negara berkembang masih belum melihat secara eksplisit kemauan negara maju untuk membantu mereka dengan pendanaan agar mencapai target pembangunan berkelanjutan. Isu hak asasi yang mendasari semua upaya pembangunan pun nyaris tak tercantum kecuali prinsip "*common but differentiated responsibilities*" sebagaimana yang terdapat pada Deklarasi Rio. Prinsip ini mewajibkan setiap negara untuk bertanggung jawab dalam menanggung beban "utang" lingkungan mereka terutama bagi negara-negara maju meskipun memiliki peranan yang berbeda-beda. Dokumen "*The Future We Want*" merupakan hasil optimal yang dapat

dicapai dan menjadi bahan untuk diadopsi pada tingkat kepala negara, Meski bukan yang terbaik tapi memberikan prospek yang cerah bagi tercapainya kesepakatan dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada berbagai tingkatan.

Upaya Green Economy Indonesia

Penerapan kebijakan ramah lingkungan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mendapat pujian pada KTT Rio+20. Pujian diberikan atas inisiatif penetapan "*Heart of Borneo*" yang meliputi tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam serta program *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang melibatkan enam negara, yakni Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Malaysia, Timor Leste dan Kepulauan Salomon. Indonesia telah dengan sukarela mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 26% untuk mengurangi laju peningkatan perubahan iklim dan sebesar 40% apabila terdapat bantuan dari internasional. Upaya ini tidak dilakukan sendiri, Indonesia juga merangkul sejumlah kelompok masyarakat bersama Norwegia untuk menurunkan GRK lewat program REDD+ serta moratoriumnya.

Saat ini negara berkembang mendesak perlunya bantuan finansial untuk beralih ke ekonomi hijau. Tetapi dengan adanya pemilu AS dan krisis di Uni Eropa, banyak bantuan yang terhenti. Sebagai konsekuensinya, negara berkembang menolak untuk meloloskan deklarasi yang mendorong ekonomi hijau sebagai terobosan pembangunan berkelanjutan. Komitmen politik untuk melaksanakan agenda pembangunan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan masih sangat rendah.

Indonesia berada di barisan terdepan dalam mendorong pelaksanaan komitmen *green economy* tersebut. Keterlibatan Indonesia dalam konferensi Rio+20 merupakan wujud peran aktif partisipasi Indonesia dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan dan lingkungan di dunia. Diharapkan nantinya penduduk

dunia akan memberi perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada lingkungan. Perjuangan Indonesia untuk mengusung isu ini akan berbuah manis jika dunia internasional merespon dengan baik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara khusus menghimbau perubahan ekonomi yang serakah menjadi ekonomi hijau (*green economy*). Konsep *green economy* telah diresmikan pada tahun 2008 oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP). Konsep perekonomian ini menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan serta tenaga kerja dipengaruhi oleh investasi pihak masyarakat dan swasta yang mengarah kepada pengurangan emisi karbon dan polusi, meningkatkan energi dan sumber daya secara efisien, dan mencegah hilangnya keberagaman ekosistem alam. Investasi yang semacam ini perlu mendapat dukungan dengan cara mengubah peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

Penerapan ekonomi hijau tidak mudah, karena berarti mengubah peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang mengarah ke ramah lingkungan. Sedangkan kondisi saat ini menunjukkan masih banyaknya pemangku kepentingan yang menginginkan agar kepentingannya dapat terpenuhi tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Globalisasi ekonomi yang diikuti kemajuan teknologi serta pola hidup yang praktis, terutama di wilayah perkotaan, telah memberikan sumbangan besar terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan nyata dari setiap pemerintah untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Tindakan nyata yang dimaksud antara lain adalah menetapkan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% dari kondisi *business as usual* pada tahun 2020, karena Indonesia ingin memberikan kontribusi pada solusi global.

Indonesia berkomitmen terhadap *green economy* dengan melakukan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau *Reducing Emissions through Deforestation and Forest*

Degradation (REDD). Pelaksanaan REDD dilakukan dengan mengukur besarnya kapasitas alami dari hutan dalam menyerap dan menyimpan karbondioksida, yang kemudian diperdagangkan di sejumlah pasar karbon seperti *Kyoto Carbon Market* dan *Chicago Climate Exchange*. REDD memungkinkan negara-negara industri untuk mengalihkan tanggung jawab pengurangan emisi karbon di dalam negeri ke negara-negara dengan areal hutan yang luas seperti Indonesia.

Peran Parlemen

Keseriusan pemerintah Indonesia untuk tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi yang berdasar pada pengeksploitasian sumber daya alam perlu didukung oleh semua pemangku kepentingan, termasuk parlemen (DPR RI). Sebagai mitra kerja pemerintah, DPR RI pun perlu menyadari bahwa dengan adanya konsep "*green economy*," maka aspek pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi akan dapat tumbuh ke arah yang lebih baik, dan bahkan juga akan dapat mengatasi ketergantungan perekonomian yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Dalam hal ini, DPR RI dapat berperan untuk mengawasi pemerintah agar tetap berada pada "*track*" yang benar dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut.

Pengawasan oleh DPR RI diperlukan karena seringkali *green economy* digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk menaikkan privatisasi dan pusat pengendalian terhadap alam itu sendiri. Dengan kata lain, konsep *green economy* justru semakin memfasilitasi adanya sistem penguasaan dan monopoli terhadap sumber daya alam. Padahal pembangunan yang mengandalkan eksploitasi dan monopoli sumber daya alam tidak akan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan bahkan justru dapat merugikan negara karena hal itu dapat memicu konflik sosial dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah.

Penutup

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertekad untuk melaksanakan *green economy* dan mendapat pujian dari dunia karena kebijakan-kebijakannya. Namun, komitmen pemerintah tersebut masih harus dicermati dan memerlukan langkah terobosan yang nyata. Sampai saat ini, masyarakat masih belum mau untuk mengubah gaya hidupnya yang cenderung konsumtif. Oleh karena itu, pemerintah perlu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terhadap arti penting dari modernitas, pembangunan dan kesejahteraan serta menjauhi sikap hidup yang konsumtif.

Pemerintah juga harus berupaya agar konsep *green economy* mendapat dukungan dari pihak swasta. Selama ini, kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke ramah lingkungan hanya bisa dalam bentuk CSR saja. Hal ini tidak cukup kuat sebagai komitmen pelaksanaan *green economy*.

DPRRI juga mempunyai peran penting untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Dengan adanya

pengawasan dari DPR RI, diharapkan akan lebih cepat menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*) dan meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek sehingga dapat tercipta *green economy* di Indonesia.

Rujukan:

1. "Green Economy," <http://www.unep.org/greeneconomy/>, diakses pada 25 Juni 2004.
2. "Presiden Serukan Ekonomi Hijau," *Kompas*, 22 Juni 2012, hal 13.
3. "Rio+20: Dokumen Siap, isu HAM Masuk Saat Akhir," *Kompas*, 21 Juni 2012, hal 14.
4. Khalisah Khalid, "Gelapnya" Ekonomi Hijau," *Kompas*, 21 Juni 2012, hal 6.
5. "Interes Ekonomi Rio+20," Effnu Subiyanto, *Republika*, 18 Juni 2012, hal 4.
6. "The Future We Want: Outcome Document Adopted at Rio+20," <http://www.un.org/en/sustainablefuture/>, diakses pada 26 Juni 2012.